



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK RENJA TAHUN 2024**

NAMA OPD	:	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
BIDANG URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM	:	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
INDIKATOR	:	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEGIATAN	:	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENGLOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

### **I. LATAR BELAKANG**

- Perubahan dan perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi yang cepat serta dinamika sosial politik seakan mempengaruhi pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat publik ataupun humas pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan perubahan tersebut.
- Secara umum pola komunikasi dimasa mendatang relative tidak berubah, komunikasi linier, sebagai basis, tetap digunakan. Namun, proses atau pendekatan komunikasi transaksional akan semakin berkembang dan menjadi kebutuhan.
- Dalam konteks strategi komunikasi dan diseminasi informasi public, prinsip komunikasi adalah tercapainya common interest yaitu bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat bertemu, tentunya tidak hanya untuk aktivitas layanan atau pengelolaan informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi kebutuhan dalam mengembangkan teknologi informasi serta penunjangnya, seperti perangkat lunak jaringan. Dengan demikian komunikasi dan informasi mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan warga negara, karena komunikasi dan informasi adalah wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari hari. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya karena mereka saling membutuhkan dan juga manusia bisa berkembang dengan berkomunikasi, sehingga komunikasi penting bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Bahkan saat ini informasi telah menyebabkan perubahan yang mendasar pada berbagai aspek, bahkan pada saat ini informasi telah menjadi bahan yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan.

### **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ini sebagai upaya Diseminasi Informasi berupa berita/konten/ desain grafis pada sosial media yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang.

### **III. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor            Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

**IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</li> <li>- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</li> <li>- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli</li> <li>- Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan</li> <li>- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</li> <li>- Belanja Tagihan Telepon</li> <li>- Belanja Paket/Pengiriman</li> <li>- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</li> <li>- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</li> <li>- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</li> <li>- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</li> </ul>	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia</li> <li>- pelaksanaan kegiatan</li> <li>- serah terima hasil pekerjaan</li> </ul>



**IX. JADWAL KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

NO.	Uraian	Anggaran	Bulan Ke-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk ATK	123.212.000,-	v			v				v			v		
2.	Belanja Benda Pos	1.650.000,-		v											
3.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kertas Cover	3.432.000,-		v							v				
4.	Belanja Alat/Bahan Untuk bahan Komputer	9.609.000,-			v										
5.	Belanja Alat/Bahan Untuk Alat Listrik	13.799.800,-			v										
6.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	360.540.000,-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7.	Belanja makanan dan Minuman Rapat	79.560.000,-	v	v	v		v	v	v		v		v		
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	245.800.000,-		v		v		v		v		v		v	
9.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.000.000,-		v									v		
10.	Belanja Tagihan Telephone	1.200.000,-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
11.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	13.680.000,-		v		v		v		v		v			
12.	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,-		v			v			v				v	
13.	Belanja Sewa Kendaraan	3.500.000,-								v					
14.	Belanja Jasa Tata Rias	24.500.000,-		v		v		v		v		v			
15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.350.000,-		v											
	<b>Jumlah,.....</b>	<b>936.832.800,-</b>													

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik adalah sebesar Rp. 936.832.800,- ( Sembilan Ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah ).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( PPTK )

PRIANTAADI WIBAWA, ST, M.Eng

NIP. 19770802 200501 1 012